

PERKEMBANGAN PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA

Rahma Latifa Zahra¹, Mita Puspita Sari², Irwan Muhammad Saputra³, Maulita Nurul Fuadah⁴, Rofi Windriani Luthfiah⁵, Herfina Herawati⁶, Randy Fadillah Gustaman⁷

¹Pendidikan Masyarakat, Universitas Siliwangi
email: 242103111023@student.unsil.ac.id

²Pendidikan Masyarakat, Universitas Siliwangi
email: 242103111046@student.unsil.ac.id

³Pendidikan Masyarakat, Universitas Siliwangi
email: 242103111064@student.unsil.ac.id

⁴Pendidikan Masyarakat, Universitas Siliwangi
email: 242103111080@student.unsil.ac.id

⁵Pendidikan Masyarakat, Universitas Siliwangi
email: 242103111113@student.unsil.ac.id

⁶Pendidikan Masyarakat, Universitas Siliwangi
email: 242103111115@student.unsil.ac.id

⁷Ilmu Politik, Universitas Siliwangi
email: randy.fadillah@unsil.ac.id

***Abstract.** This study explores the historical development of Pancasila, the ideological foundation of Indonesia, tracing its roots from ancient kingdoms such as Kutai, Sriwijaya, Singasari, Majapahit, Sunda, and Mataram. Utilizing a literature review method, the research analyzes the evolution and implementation of Pancasila through various historical phases: the exploration during the kingdom era, the formulation and ratification in the BPUPK sessions in 1945, and its application during the Old Order, New Order, and Reformasi periods. The values of Pancasila are reflected in the social, political, and spiritual practices of these kingdoms, such as the Kenduri in Kutai, the Buddhist teachings in Sriwijaya, cultural openness in Singasari, religious tolerance in Majapahit, the principles of Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh, and Silih Wawangi in Sunda, and the spirit of mutual cooperation in Mataram. The research highlights the dynamic adaptation of Pancasila values in the context of Indonesia's transition from colonialism to independence, its role as a national guiding principle, and its resurgence in contemporary society through tolerance, deliberation, patriotism, and solidarity.*

Keywords: Pancasila, Indonesia Ideology, Historical Development

I. PENDAHULUAN

Menurut Siahaan, J., dkk (2022) Indonesia merupakan negara yang dikenal memiliki keanekaragamannya, 70% dari keseluruhan wilayah Indonesia adalah air sehingga menjadikan wilayah Indonesia terpecah menjadi 17.504 pulau, 714 suku, serta memiliki 1.100 bahasa daerah, banyaknya keberagaman menjadikan Indonesia dikenal dengan negara yang kaya. Kekayaan tersebut tentunya membuat warga Indonesia bangga berada di negara ini, namun dengan adanya banyak keberagaman

maka akan banyak pula konflik yang terjadi di negara Indonesia. Maka dari itu Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa, hal tersebut diartikan bahwa Pancasila adalah perangkat yang utuh, untuk secara langsung menjadi perumusan tujuan dan cita di negara Indonesia, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Siahaan, J. dkk. 2022). Pancasila adalah ideologi negara Indonesia, yang di mana Pancasila adalah patokan atau panduan hidup bagi bangsa Indonesia (Sa'diyah & Dewi, 2022).

Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila mempunyai arti penting dalam sejarah negara ini. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa yang berbeda, namun Pancasila telah berhasil menyatukan perbedaan tersebut menjadi kekuatan yang menciptakan persatuan dan solidaritas. Sejak disahkan pada 18 Agustus 1945, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman ideologis, tetapi juga simbol persatuan nasional yang mengakui keberagaman sebagai kekayaan. Perkembangan Pancasila sepanjang sejarah Indonesia menunjukkan bahwa ideologi ini tetap relevan di masa perubahan, tantangan politik, dan perbedaan sosial. Pancasila dengan kelima silanya merupakan landasan yang mempersatukan seluruh elemen bangsa Indonesia, yang memberikan kekuatan bagi negara dalam keberagaman dan kekuatan menghadapi tantangan global.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu nilai keagamaan atau kebaikan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan hidup bermasyarakat. Bunyi daripada Pancasila itu sendiri yakni, (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, (5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pancasila tidak lahir dengan keadaan mendadak atau tanpa persiapan apapun, namun Pancasila melalui berbagai tahap/proses yang begitu panjang. Bangsa Indonesia sendiri lahir sekitar abad ke- 4 atau 5 Masehi, pada saat itu juga kerajaan Kutai yang memulai sejarah Bangsa Indonesia. Kerajaan Kutai menjadi salah satu sumber utama yang penting dalam menggali Pancasila dan masuk pada kajian sejarah bangsa Indonesia dalam masa Pancasila Pra Kemerdekaan. Pancasila mengalami berbagai proses mulai dari masa Pancasila Pra Kemerdekaan, Periode Perumusan & Pengesahan Pancasila, dan Era Pasca Kemerdekaan.

Pada saat masa Pancasila Pra Kemerdekaan, terdapat beberapa proses yang tertulis dalam sejarah Pancasila yang bermula dari berbagai kerajaan hingga penjajahan. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua yang memulai sejarah bangsa Indonesia dan Pancasila. Adapun nilai Pancasila pada masa Kerajaan Kutai

yaitu (1) Nilai Ketuhanan, (2) Nilai Kerakyatan, (3) Nilai Persatuan. Kemudian dilanjut oleh Kerajaan Sriwijaya yang pada hakekatnya nilai-nilai budaya Kerajaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila (Fidowaty, 2020). Setelah Kerajaan Sriwijaya terdapat kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit yang pada abad ke-15 berdiri Kerajaan Singasari, yang dimana kerajaan ini sangat erat hubungannya dengan berdirinya Kerajaan Majapahit.

Menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2021 sebagaimana dikutip oleh Adnyana (2022) mengatakan nilai-nilai Pancasila sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dengan implementasi masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila namun belum dinamai dengan Pancasila.

Setelah Kerajaan Majapahit adapun Kerajaan Sunda yang memiliki nilai-nilai dan budaya Sunda kuno yang mirip dengan Pancasila seperti nilai-nilai keadilan Kerajaan Sunda dalam mengatur kehidupan masyarakat Sunda yang tertuang pada Sila kedua Pancasila, nilai ketuhanan yang tertuang pada Sila pertama Pancasila, serta nilai gotong royong masyarakat sunda yang tertuang pada Sila ketiga dan keempat Pancasila (Wasitaatmadja, F. F. 2018). Kemudian hadir kerajaan-kerajaan Islam yang diterima dengan baik di Nusantara dan masuk secara damai, karena sebelumnya Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit dan Sunda menganut agama Hindu dan Buddha. Salah satu kerajaan Islam yang hadir adalah Kerajaan Mataram, dimana kerajaan Islam di Indonesia ini terus meraih kegemilangan dalam berbagai aspek peradaban, baik secara ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, bahkan pemerintahan, hingga mulai mengalami kemunduran ketika masuknya kolonialisme ke Indonesia.

Selain itu adapun dasar-dasar kebangsaan yang mulai berkembang dalam masyarakat Indonesia, hal ini terlihat dari nilai-nilai adat-istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang mengiringinya. Nasionalisme pun mulai tampak ketika pengaruh kerajaan Islam mulai memudar dan munculnya semangat kemerdekaan pada abad ke-18. Meskipun pengaruh multikultural sangatlah berpengaruh dalam perjuangan bangsa Indonesia, namun masyarakat Indonesia kala itu mampu mewujudkan daya tampung luar biasa

untuk mengintegrasikan berbagai macam suku, tradisi dan budaya.

Maka tidak dapat dipungkiri bahwa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia merupakan garda terdepan yang menolak secara langsung adanya kolonialisme dan penjajahan di Indonesia. Hal ini berimplikasi pada timbulnya jiwa kemerdekaan dan nasionalisme pada masyarakat Indonesia kala itu. Hal itu berkaitan dengan proses selanjutnya yaitu penjajahan dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Dalam penjajahan, lahirnya Pancasila turut menjadi saluran perkembangan dan transformasi nasionalisme untuk bangsa Indonesia (Alfaqi, 2016).

Rasa persatuan mulai muncul karena tokoh-tokoh terpelajar menciptakan berbagai organisasi yang bergerak dalam bidang pergerakan nasional. Oleh karena itu, muncullah hari Kebangkitan Nasional yang menjadi salah satu fase sejarah penting untuk kelahiran Negara Indonesia dan mulai menciptakan ideologi bangsa. Kemudian dilanjut dengan terbentuknya sumpah pemuda yang sepakat untuk satu bahasa, satu bangsa dan satu tanah air Indonesia. Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia (Pujiarti dkk, 2021).

Setelah melewati masa Pancasila Pra Kemerdekaan, kemudian adanya Periode Perumusan dan Pengesahan Pancasila yang bermula dari penjajahan Jepang, dalam penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan ditemui banyak permasalahan, diantaranya: Pada tanggal 1 Maret 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk dibawah kepemimpinan Dr. K. R. T. Radjiman Wedyodiningrat dengan tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia (Harefa, A., & Daliwu, S. 2021). Pada sidang pertama BPUPKI yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam bentuk awalnya, Pancasila terdiri dari tujuh sila, yang kemudian direvisi menjadi lima sila pokok. Dalam usulan

tersebut, Soekarno menamakan dasar negara itu "Pancasila". Setelah melalui beberapa kali revisi, Pancasila akhirnya diterima dan disahkan dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 18 Agustus 1945. Pancasila kemudian digunakan dalam Piagam Jakarta dan UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sila pertama, yang awalnya berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya," diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Hatta mengusulkan perubahan kalimat tersebut guna mendukung semangat persatuan, dan usul itu pun disetujui (Harefa, A., & Daliwu, S. 2021).

Setelah itu adapun masa pasca-kemerdekaan, Pancasila mengalami banyak perkembangan salah satunya tahap percobaan demokrasi. Namun, pada tahun 1959, Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang kurang sesuai dari spirit nilai-nilai Pancasila, terutama yang berkaitan dengan sila permusyawaratan. Di masa Orde Baru, Soeharto berusaha untuk memulihkan kembali beberapa distrust yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia. Upaya pemulihan kembali ini ditandai dengan dibuatnya Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun. Diadakannya PEMILU, pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, serta pemerataan pembangunan. Tentunya upaya pemulihan oleh Soeharto ini mengacu pada nilai yang terkandung dalam Pancasila. Contohnya pemerataan pembangunan ini bisa dikaitkan dengan sila kelima Pancasila, yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memasuki era reformasi, yang di ketuai oleh B.J. Habibie mengeluarkan UU. Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum dan mulai pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara terus digaungkan hingga saat ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka mengenai nilai-nilai pancasila dapat dilihat dari berbagai periode sejarah Indonesia. Pada masa penggalian nilai-nilai Pancasila, Kerajaan Kutai menunjukkan praktik sosial dan politik melalui Kenduri yang mencerminkan nilai ketuhanan dan sosial (Aminuddin, 2022). Di

Kerajaan Sriwijaya, nilai-nilai Pancasila muncul dalam bentuk pengajaran agama Buddha yang menekankan toleransi antarumat beragama. Kerajaan Singasari dikenal dengan keterbukaannya terhadap budaya luar, yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam aspek budaya (Ricklefs, 2010). Sementara itu, Kerajaan Majapahit menonjolkan toleransi antarumat beragama dan kerukunan sosial. Di Kerajaan Sunda, prinsip Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh, dan Silih Wawangi mencerminkan nilai gotong royong dan saling menghormati (Purwanti, M. I. 2013). Kerajaan Mataram menekankan kebiasaan gotong royong dalam masyarakat sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila (Geertz, 1976). Selanjutnya, pada masa perumusan dan pengesahan Pancasila, proses ini dimulai dalam sidang BPUPK yang dipimpin oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, menghasilkan rumusan dasar negara (Abdurrahman, 2005). Dalam masa implementasi Pancasila pasca kemerdekaan, pada masa Orde Lama, Pancasila diadaptasi dalam konteks transisi dari penjajahan ke kemerdekaan (Siagian, M., dkk. 2024). Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan pedoman hidup bangsa, meskipun sering digunakan sebagai instrumen kekuasaan (Crouch, 1978). Di masa Reformasi, nilai-nilai Pancasila kembali dihidupkan melalui toleransi, musyawarah, cinta tanah air, dan solidaritas. Implementasi Pancasila pasca Reformasi menekankan demokrasi yang lebih terbuka, dengan penekanan pada hak asasi manusia dan pluralisme (Aspinall, 2005).

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode studi kepustakaan atau kajian literatur. Yang dimana metode studi kepustakaan atau kajian literatur ini sebagai prosedur dalam penelitian untuk mencari, membaca, menganalisis, serta membuat bahan laporan-laporan yang memuat pada teori agar sesuai dan relevan dengan apa yang dibahas dan diungkapkan dalam penelitian ini (Hadi, N. F., & Afandi, N. K. (2021). Kami mengkaji beberapa hasil penelitian jurnal dan buku yang relevan agar

sesuai dengan topik yang dibahas dalam penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Masa penggalan nilai-nilai Pancasila di Indonesia dapat dilihat dari berbagai kerajaan yang pernah ada, yang mencerminkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kerajaan Kutai, misalnya, menunjukkan nilai Ketuhanan melalui praktik beragama Hindu, nilai Kerakyatan dengan masyarakat yang makmur, dan nilai Persatuan dengan wilayah yang luas di Kalimantan Timur. Hal ini sejalan dengan catatan yang menekankan pentingnya aspek sosial, politik, dan ketuhanan dalam kehidupan masyarakat Kutai (Hulu, Y. Dkk. 2022).

Kerajaan Sriwijaya, yang pernah menjadi pusat pengajaran agama Buddha di Asia Tenggara, mencerminkan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan dengan sikap terbuka kepada pendatang, Persatuan dalam menyatukan pedagang dan pengrajin, Kerakyatan dengan kehidupan masyarakat yang sejahtera, serta Keadilan yang tidak membedakan latar belakang (Damri, M. P., Putra, F. E., & Kom, M. I. 2020). Hal ini menunjukkan bahwa Sriwijaya tidak hanya berfungsi sebagai pusat ekonomi, tetapi juga sebagai tempat interaksi sosial yang harmonis.

Kerajaan Singasari, di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara, menekankan nilai Ketuhanan dengan memeluk agama Buddha dan Kemanusiaan melalui keterbukaan terhadap budaya asing. Nilai Persatuan terlihat dari cita-cita untuk mempersatukan Nusantara, sedangkan Kerakyatan dan Keadilan tercermin dari kehidupan rakyat yang makmur dan tidak membedakan kedudukan. Ini menunjukkan bahwa Singasari memiliki visi yang luas untuk menciptakan masyarakat yang inklusif.

Majapahit, yang memiliki keragaman agama, mencerminkan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan dalam relasi internasional, Persatuan di antara tiga agama, dan Kerakyatan melalui musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa Majapahit berhasil menciptakan harmoni di tengah perbedaan,

yang menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia.

Kerajaan Sunda, dengan filosofi Catur Silih, mencerminkan nilai Ketuhanan, Keadilan, dan Gotong Royong. Filosofi ini menekankan pentingnya kerja sama dan saling menghargai, yang relevan dalam konteks pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda (Hulu, Y. Dkk. 2022).

Kerajaan Mataram Islam menunjukkan nilai Ketuhanan melalui religiusitas masyarakat, Kemanusiaan dengan penghargaan antarumat beragama, Persatuan dalam kebiasaan gotong royong, Kerakyatan dengan kehidupan rakyat yang sejahtera, dan Keadilan melalui hukum kerajaan sebagai sumber hukum. Ini menunjukkan bahwa Mataram Islam berusaha untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Dalam konteks sejarah, masa penjajahan dan kebangkitan nasional juga berkontribusi pada penggalian nilai-nilai Pancasila. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda, meskipun sering kali terpecah-pecah, menunjukkan semangat cinta tanah air yang kuat. Gerakan Budi Utomo dan Sumpah Pemuda menjadi tonggak penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan, menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara pada tahun 1945 menunjukkan dinamika pemikiran para tokoh bangsa. Usulan dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno mencerminkan komitmen untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, dan adil. Perubahan pada rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta, yang menghilangkan tujuh kata pada sila pertama, menunjukkan upaya untuk menjaga persatuan bangsa di tengah keragaman.

Setelah kemerdekaan, penerapan nilai-nilai Pancasila mengalami berbagai tantangan. Pada masa Orde Lama, terdapat penyimpangan seperti pemberontakan PKI, sedangkan pada masa Orde Baru, Soeharto berusaha memulihkan kekacauan dengan mengacu pada nilai Pancasila, meskipun diwarnai masalah KKN. Masa Reformasi membawa perubahan dengan upaya

memperbaiki sistem politik dan ekonomi, serta menguatkan Pancasila sebagai ideologi negara.

Di era globalisasi, tantangan terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila semakin berat, terutama dengan pengaruh teknologi dan individualisme yang menggeser nilai kolektivitas. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai Pancasila pada generasi muda menjadi sangat penting. Toleransi antarumat beragama, musyawarah dalam pengambilan keputusan, cinta tanah air, dan membantu sesama adalah beberapa cara untuk membentuk karakter dan moral generasi penerus bangsa (Khalisah et al., 2025).

Penggalian nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan di Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari praktik dan tradisi yang telah ada dalam masyarakat sejak lama. Kerajaan-kerajaan seperti Kutai, Sriwijaya, Singasari, Majapahit, Sunda, dan Mataram telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan mereka, baik dalam konteks sosial, politik, maupun budaya.

Kerajaan Kutai, dengan praktik Kenduri yang melibatkan sedekah kepada Brahmana, menunjukkan nilai Ketuhanan yang kuat. Hal ini mencerminkan pengakuan terhadap kekuatan spiritual dan peran agama dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, nilai Kerakyatan dan Persatuan yang terlihat dari kemakmuran rakyat dan luasnya wilayah yang dikuasai menunjukkan bahwa kerajaan ini memiliki sistem pemerintahan yang mampu menjaga kesejahteraan masyarakat.

Sriwijaya, sebagai pusat pengajaran agama Buddha, tidak hanya mencerminkan nilai Ketuhanan, tetapi juga Kemanusiaan dan Persatuan. Dengan menyatukan pedagang, pengrajin, dan pegawai raja, Sriwijaya menciptakan sistem ekonomi yang teratur dan efisien, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam konteks ekonomi dan sosial yang harmonis.

Kerajaan Singasari, di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara, menekankan pentingnya keterbukaan

terhadap budaya asing. Ini mencerminkan nilai Kemanusiaan dan Persatuan yang ingin mempersatukan Nusantara. Dengan mengedepankan nilai-nilai ini, Singasari berusaha menciptakan masyarakat yang inklusif dan beragam, yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia hingga saat ini.

Majapahit, yang dikenal dengan keragaman agama dan budaya, menunjukkan bahwa nilai Ketuhanan dapat hidup berdampingan dalam harmoni. Kebersamaan antara Hindu, Buddha, dan Islam dalam satu pemerintahan mencerminkan nilai Persatuan yang kuat. Selain itu, adanya profesi khusus yang memberikan arahan musyawarah menunjukkan bahwa Kerakyatan juga diutamakan dalam pengambilan keputusan, yang merupakan salah satu prinsip dasar Pancasila.

Filosofi Catur Silih dari Kerajaan Sunda menekankan pentingnya kerja sama dan saling menghargai, yang relevan dalam konteks pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda. Nilai-nilai ini sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan modern, di mana kolaborasi dan solidaritas menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis.

Kerajaan Mataram Islam menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam konteks keagamaan. Dengan menghargai dan menghormati antarumat beragama, Mataram menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya relevan dalam konteks politik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dalam konteks sejarah, masa penjajahan dan kebangkitan nasional memberikan kontribusi signifikan terhadap penggalan nilai-nilai Pancasila. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda, meskipun sering kali terpecah-pecah, menunjukkan semangat cinta tanah air yang kuat. Gerakan Budi Utomo dan Sumpah Pemuda menjadi tonggak penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan, menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara pada tahun

1945 menunjukkan dinamika pemikiran para tokoh bangsa. Usulan dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno mencerminkan komitmen untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, dan adil. Perubahan pada rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta, yang menghilangkan tujuh kata pada sila pertama, menunjukkan upaya untuk menjaga persatuan bangsa di tengah keragaman.

Setelah kemerdekaan, penerapan nilai-nilai Pancasila mengalami berbagai tantangan. Pada masa Orde Lama, terdapat penyimpangan seperti pemberontakan PKI, sedangkan pada masa Orde Baru, Soeharto berusaha memulihkan kekacauan dengan mengacu pada nilai Pancasila, meskipun diwarnai masalah KKN. Masa Reformasi membawa perubahan dengan upaya memperbaiki sistem politik dan ekonomi, serta menguatkan Pancasila sebagai ideologi negara. Pada era globalisasi, tantangan terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila semakin berat, terutama dengan pengaruh teknologi dan individualisme yang menggeser nilai kolektivitas. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai Pancasila pada generasi muda menjadi sangat penting. Toleransi antarumat beragama, musyawarah dalam pengambilan keputusan, cinta tanah air, dan membantu sesama.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Pancasila mengalami perkembangan yang signifikan dalam sejarah bangsa Indonesia, mulai dari masa pra-kemerdekaan hingga era reformasi. Nilai-nilai Pancasila telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, tercermin dalam kehidupan masyarakat kerajaan-kerajaan kuno seperti Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan Sunda. Proses perumusan dan pengesahan Pancasila melibatkan tokoh-tokoh penting dan melalui berbagai sidang hingga akhirnya disahkan sebagai dasar negara. Implementasi Pancasila pasca-kemerdekaan mengalami dinamika, termasuk periode demokrasi, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, di mana setiap masa memberikan tantangan dan penyesuaian tersendiri terhadap pemahaman dan pengamalan Pancasila. Pancasila terus

relevan sebagai ideologi yang membimbing bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan negara di tengah perubahan zaman dan tantangan globalisasi.

Untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa Indonesia harus menanamkan sikap nasionalisme sejak dini. Karena jika sikap nasionalisme tidak diimplementasikan sejak dini, bangsa Indonesia telah kehilangan generasi muda yang rendah akan sikap nasionalisme. Untuk menambah rasa nasionalisme bangsa Indonesia adalah dengan dilatih tentang sikap-sikap yang baik sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila dan selalu diterapkan dari hal yang paling kecil, tidak mengajarkan hal-hal yang melanggar nilai-nilai Pancasila, menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini contohnya dengan menghafal lima asas Pancasila dan menghafalkan lagu Indonesia Raya, dan memberi penyuluhan kepada seluruh bangsa Indonesia akan pentingnya nasionalisme terhadap masa depan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2005). Islam yang memihak. LKIS Pelangi Aksara.
- Aminuddin, S. (2022). PANCASILA DALAM BINGKAI PEMIKIRAN SOEKARNO. *Jurnal Al-Harakah* Volume, 4(02).
- Adnyana, I. K. S. (2022). Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila Melalui Pembelajaran Bahasa Dan Sastra. *Pedalitra: Prosiding Pedagogi, Linguistik, Dan Sastra*, 2(1), 28-36.
- Alfaqi, MZ (2016). Melihat sejarah nasionalisme Indonesia untuk menumbuhkan sikap kebangsaan generasi muda. *Jurnal PKn: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol: 13(2), 209-216.
- Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, resistance, and regime change in Indonesia*. Stanford University Press.
- Crouch, H. A. (2007). *The army and politics in Indonesia*. Equinox Publishing.
- Fidowaty, T. (2020). *Pancasila Dalam Sejarah Indonesia (masa Proklamasi Kemerdekaan)*. Geertz, C. (1976). *The religion of Java*. University of Chicago press.
- Harefa, A., & Daliwu, S. (2021). *Teori Pendidikan Pancasila dan Antikorupsi*. Penerbit Lutfi Gilang.
- Khalisah, S., Ramadlona, O. K. P., & Puspita, A. M. I. (2025). Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari Mahasiswa: Tantangan dan Solusi di Era Modern. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 2424-2427.
- Pujiarti, R., Suhertina, S., Ardian, MR, & Rahmadani, NN (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Pelajar di Era Globalisasi. *IJOCE: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia*, 2 (1), 24-28.
- Purwanti, M. I. 2013. Implementations Of Sundanese Local Wisdom In Civic Studies As A Reinforcement For Students'characters (A Case Study Of Junior High School Students In SMP Negeri 3 Purwakarta). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 26(1), 39-52.
- Ricklefs, M. C., & Ricklefs, M. C. (Eds.). (2010). *A new history of Southeast Asia* (Vol. 330). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Sa'diyah, M. K., & Dewi, D. A. (2022). Penanaman Nilai-Nilai Pancasila di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9940-9945.
- Siagian, M. B., Sihombing, C. J., & Sitinjak, R. G. (2024). Pentingnya Pengetahuan Pancasila Dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia Bagi Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(4), 15696-15702.
- Siahaan, J., Agustina, R., Jonandes, R., & Fitriyono, R. A. (2022). Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa indonesia. *Gema Keadilan*, 9(3), 231-240.
- Wasitaatmadja, F. F. (2018). *Spiritualisme Pancasila*. Prenada Media.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. (2021).

Penerapan Pancasila dari Masa ke
Masa. Diakses 15 April 2025.
[<https://bPIP.go.id/artikel/penerapan-pancasila-dari-masa-ke-masa>]